

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap negara terkena dampak negatif oleh populasi yang terus bertambah. Pertumbuhan populasi akan menyebabkan negara-negara berkembang khususnya Indonesia dalam menghadapi tantangan yang signifikan. Populasi jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada pertengahan 2023 terdapat 278,7 juta orang yang tinggal di Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai dengan 2023 terjadi peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia secara berturut-turut. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia mencapai 266,9 juta jiwa; pada tahun 2020 dengan jumlah 270,2 juta jiwa; pada tahun 2021 sebanyak 272,7 juta jiwa; pada tahun 2022 sebanyak 275,8 juta jiwa; dan pada tahun 2023 sebanyak 278,7 juta jiwa.



Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk ini yang menciptakan suatu tantangan bagi Indonesia. Indonesia masih memiliki tantangan dalam mengatasi permasalahan perekonomian, yaitu pengangguran. Setiap negara berkembang masih terfokus dengan masalah pengangguran. Kebijakan pemerintah yang mengarah pada perluasan lapangan kerja menjadi solusi dalam menanggulangi pengangguran (Kharisma & Wardhana, 2021). Salah satu penyebab terjadinya masalah pengangguran adalah terbatasnya kesempatan kerja dibandingkan banyaknya pencari kerja. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya populasi jumlah penduduk tersebut.



**Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2019-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di atas dapat dilihat bahwa jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2023 mencapai 5,32% dengan total sebanyak 7,86 juta orang Indonesia yang menganggur. Jumlah ini turun dari persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun sebelumnya, sebanyak 0,54% per Agustus 2022. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tingkat pengangguran Indonesia masih relatif tinggi atau terbilang banyak apabila dibandingkan sebelum pandemi COVID-19, yakni pada Agustus 2019 yang hanya mencapai 5,28% atau sebanyak 7,05 juta pengangguran.

Salah satu sumber daya terpenting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja yang berkualitas. Setiap orang mempunyai peluang untuk berwirausaha. Menurut Rumawouw dalam Hapsah & Savira (2015) kewirausahaan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi suatu bangsa. Untuk memperkuat perekonomian negara, maka perlu memaksimalkan potensi wirausaha tersebut. Munculnya UMKM menjadi salah satu hal terpenting karena akan menjadi lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Peningkatan UMKM memberi masyarakat lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan berwirausaha, melalui penciptaan lapangan kerja dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran secara tidak langsung.

Peran dan kehadiran UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberi mereka kemampuan untuk menyerap tenaga kerja, dan memberikan hasil pembangunan kepada masyarakat (Al Farisi et al., 2022). Keberlangsungan UMKM hingga saat ini membuat banyak pihak meyakini bahwa UMKM akan menjadi langkah penting dalam menopang perekonomian nasional. UMKM menjadi penyelamat perekonomian karena dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan.

Terdapat 99% dari seluruh badan usaha di Indonesia adalah UMKM dengan jumlah 65,5 juta di antaranya, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia signifikan, terhitung 61% dari PDB negara atau Rp9.580 triliun. Selain itu, kontribusi penyerapan tenaga kerja UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja negara secara keseluruhan adalah 97%. UMKM Indonesia telah secara signifikan mendongkrak perekonomian negara (Nasrun et al., 2022). Hal ini menunjukkan bagaimana kontribusi UMKM secara signifikan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia.

Peningkatan partisipasi pekerja di sektor UMKM menjadi salah satu solusi dalam menanggulangi masalah pengangguran. Sebagian besar pelaku usaha terdapat pada sektor UMKM. UMKM memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong perekonomian negara (Widjaja et al., 2018). UMKM berfungsi sebagai platform bagi pengusaha dan perlu diperkuat agar dapat lebih mendongkrak perekonomian negara.

Departemen Koperasi (2008) menyatakan bahwa UMKM memainkan sejumlah peran dalam perekonomian antara lain: (1) bertindak sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi; (2) menciptakan lapangan kerja; (3) menjadi kontributor signifikan bagi pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; (4) membuka pasar baru dan berfungsi sebagai sumber inovasi; dan (5) berdampak pada neraca pembayaran. Oleh karena itu, pengembangan UMKM harus terencana dan terimplemetasikan dengan baik dengan mengembangkan wirausaha-wirausaha yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka, diharapkan jumlah UMKM terus meningkat.

Menurut Ardiansyah et. al (2022), dalam proses pengembangan UMKM tidak luput dari adanya berbagai permasalahan. Pemasaran, produksi, keuangan, dan manajemen sumber daya manusia merupakan beberapa masalah UMKM yang masih sering muncul (Widyastuti & Parianom, 2022). Permasalahan tersebut tidak luput hilang serta dialami oleh kebanyakan UMKM baik yang lama maupun yang baru dioperasikan.

Masalah tersebut yang menyebabkan UMKM sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Tiga masalah utama yang menghalangi UMKM untuk berkembang telah diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara lain: (1) sejumlah besar UMKM belum mendapat manfaat dari teknologi digital, terutama dalam pemasaran dan akses pasar; (2) akses pembiayaan atau modal usaha; dan (3) kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang rendah, banyak pelaku UMKM yang terus sulit memasarkan produk, kurang inovasi, kesulitan mengelola perizinan, dan tidak mampu mengelola laporan keuangan. Oleh karena

itu, pemerintah terus berusaha mencari cara terbaik dalam mengembangkan UMKM agar dapat menumbuhkan perekonomian dan memaksimalkan kemampuan dan keberlangsungan UMKM.

Pemerintah merumuskan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, kebijakan tersebut berisi tentang beberapa upaya yang dilakukan dalam pengembangan UMKM melalui (1) pemberdayaan; (2) iklim usaha; (3) pengembangan usaha; (4) pembiayaan; (5) penjaminan; serta (6) kemitraan. Beberapa upaya dalam pengembangan UMKM tersebut dapat berjalan tentunya membutuhkan peran dari internal. Lingkungan internal mencerminkan kekuatan atau kelemahan organisasi bisnis dan kemampuan tim manajemen dalam menjalankan perusahaan (Siagian et al., 2019). Faktor-faktor internal berikut yang berdampak pada kinerja UMKM: (a) faktor yang berkaitan dengan sumber daya manusia; (b) aspek keuangan; (c) faktor produksi; dan (d) faktor pemasaran (Subroto et al., 2016).

*Human resources* merupakan faktor internal dalam pengelolaan UMKM yang dalam pengembangannya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Pengembangan kualitas *human resources* merupakan cara yang banyak dilakukan untuk membantu pengembangan UMKM (Widjaja et al., 2018). Dengan mendapatkan lebih banyak keahlian di bidang pemasaran, metode produksi, dan manajemen keuangan dapat membantu mencapai hal ini. Oleh karena itu, masih banyak kendala yang harus diatasi dalam pengembangan UMKM, terutama dalam hal pemasaran, permodalan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi dalam usaha Mikro dan Kecil dengan melihat jumlahnya pada tahun 2022 sebanyak 667.795 unit. Jumlah tersebut hasil dari peningkatan dari tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022 Kota Depok memiliki jumlah UKM yang cukup besar dengan sebanyak 11.429 unit tetapi jumlah tersebut masih sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan Kota Bandung dan Tasikmalaya.

**Tabel 1. 1 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022**

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota (Unit)		
	2020	2021	2022
Bogor	52852	45013	43138
Sukabumi	52953	51796	51307
Cianjur	37807	44089	36331
Bandung	42385	40136	41220
Garut	54630	62842	69365
Tasikmalaya	53601	46132	77632
Ciamis	28161	29628	30454
Kuningan	9374	16180	11317
Cirebon	19455	18053	21939
Majalengka	28762	26634	33468
Sumedang	16166	19160	24739
Indramayu	15052	16481	18946
Subang	25091	18014	16958
Purwakarta	11566	14504	13486
Karawang	15257	14239	15410
Bekasi	20315	20610	19111
Bandung Barat	12005	22366	20213
Pangandaran	28111	12906	32043
Kota Bogor	6698	5669	4620
Kota Sukabumi	4694	5392	5787
Kota Bandung	18336	22230	18174
Kota Cirebon	5298	4767	4335
Kota Bekasi	8070	10824	8971
Kota Depok	14716	13916	11429
Kota Cimahi	6538	6552	6087
Kota Tasikmalaya	33089	30306	26706
Kota Banjar	4961	3786	4609
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>625943</b>	<b>622225</b>	<b>667795</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Kota Depok merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk sebesar 2.145.400 jiwa pada tahun 2023. Kota Depok mengalami peningkatan PDRB sebesar 5.24% pada tahun 2022. Akan tetapi, angka ini sedikit

lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan PDRB Jawa Barat (5.45%) dan PDB nasional (5.31%). Kota Depok mempunyai potensi yang cukup besar di sektor usaha. Potensi keberlangsungan sektor usaha di Kota Depok dapat dilihat dari data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bahwa jumlah usaha mikro di Kota Depok dalam setiap tahunnya memiliki jumlah yang cukup besar.

**Tabel 1. 2 Jumlah Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah Usaha Mikro
2021	2803
2022	2110
2023	2114

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok (data diolah)

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah usaha dan pada tahun 2023 terjadi kembali peningkatan dalam jumlah yang sedikit. Dengan melihat jumlah usaha mikro di Kota Depok tersebut membuktikan bahwa Kota Depok memiliki potensi besar di sektor usaha.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok telah mencetak ribuan wirausaha baru dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun, hal ini tidak lepas dari masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam upaya pengembangannya. Terutama yang berkaitan dengan masalah permodalan, manajemen keuangan, sumber daya manusia, pengembangan produk, dan pemasaran. Tantangan dan masalah ini tetap sama dengan yang dihadapi negara. Stabilitas dari berbagai permasalahan dan tantangan diperlukan untuk menjaga keberlangsungan serta pengembangan usaha di Kota Depok.

Kecamatan Pancoran Mas merupakan salah satu dari sebelas kecamatan di Kota Depok yang membawahi enam kelurahan. Kecamatan Pancoran Mas telah

berkontribusi sebesar 6.04% terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2022. Beberapa sektor dalam lapangan usaha yang mendukung kemajuan dari Kecamatan Pancoran Mas di dominasi oleh sektor usaha kuliner, seperti restoran cepat saji atau kafe. Kecamatan ini termasuk yang paling aktif dalam segi perkembangan lapangan usaha (Fakultas Matematika dan IPA, 2023).

**Tabel 1. 3 Jumlah Usaha Mikro Kota Depok Berdasarkan Kecamatan (2023)**

No	Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro
1	Beji	233
2	Bojongsari	209
3	Cilodong	229
4	Cimanggis	220
5	Cinere	85
6	Cipayung	181
7	Limo	106
8	Pancoran Mas	230
9	Sawangan	165
10	Sukmajaya	258
11	Tapos	198
<b>Jumlah Usaha Mikro Kota Depok</b>		<b>2114</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok (data diolah)

Salah satu kecamatan Kota Depok yang berpotensi dalam berwirausaha inovatif yang dapat mendongkrak taraf hidup masyarakat adalah Kecamatan Pancoran Mas. Kecamatan Pancoran Mas merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah usaha mikro yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain dengan 230 unit, menurut data statistik dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Kecamatan Pancoran Mas masih menghadapi kesulitan mengembangkan perusahaannya terutama yang berkaitan dengan pemasaran, modal, dan tata kelola sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut sesuai dengan data yang didapat peneliti dari hasil wawancara dengan Ibu Rini Rahayu selaku Ketua Komunitas UMKM Pancoran Mas. Berikut ini merupakan data temuan masalah yang ada antara lain:

**Tabel 1. 4 Data Temuan Masalah**

No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Solusi yang ditawarkan	Metode Pelaksanaan
1	Permodalan	Banyaknya pelaku usaha mikro yang masih memiliki keterbatasan modal usaha dan kesulitan dalam mendapatkan modal tambahan dari lembaga keuangan.	Pemerintah memberikan akses permodalan dengan pinjaman subsidi bunga (Kredit Usaha Rakyat/KUR).	Dengan memberikan akses dan info terkait bantuan permodalan atau pinjaman.
2	Pemasaran	Adanya keterbatasan pemahaman pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan memasarkannya. Kemudian, masih rendahnya minat pelaku usaha untuk mengikuti pelatihan.	Dengan memfasilitasi program pemasaran produk usaha dan pelatihan pengembangan produk.	Pelatihan (workshop), kegiatan bazar, dan pengenalan produk kepada dinas-dinas.
3	Tata kelola sumber daya manusia	Kualitas SDM dari pelaku usaha yang rendah sulit untuk berkembang karena kurangnya menerima perubahan yang ada, kurangnya mindset/pola pikir kewirausahaan, dan pemahaman dalam pengelolaan keuangan.	Dengan mengadakan program pelatihan dan pendidikan terkait kewirausahaan, serta pengelolaan keuangan.	Pelatihan manajemen sdm, pendidikan kewirausahaan, dan pelatihan pengelolaan keuangan.

Sumber: Data primer diolah (2024)

Dapat disimpulkan dari masalah dan tantangan tersebut bahwa aspek yang berkontribusi terhadap pengembangan usaha adalah kualitas sumber daya manusia. Menurut Subowo dan Setiawan (2015), semua kegiatan organisasi termasuk proses manufaktur didorong dan ditentukan oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia mempunyai peranan yang besar dalam menentukan kemajuan dan perkembangan suatu usaha. Menurut Rahardjo (2010:18) menguraikan bagaimana kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh pendidikan atau tingkat pengetahuan, pengalaman atau kematangan, sikap dan nilai, serta tingkat pendidikan seseorang. Pendidikan dan kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan) merupakan penanda kualitas sumber daya manusia.

Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) memberikan data pada tahun 2022 mengenai pencapaian pendidikan pelaku UMKM sebagai berikut:

**Tabel 1. 5 Tingkat Pendidikan Pelaku UMKM Tahun 2022**

No	Tingkat Pendidikan	Persentase (persen)
1	Tidak Tamat SD	11
2	Tamat SD/ sederajat	36
3	Tamat SMP/ sederajat	12
4	Tamat SMA/ sederajat	36
5	Tamat Diploma I/ lebih	5

Sumber: Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (data diolah)

Menurut data tersebut mayoritas pelaku UMKM (95%) telah menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SMA, sementara hanya 5% yang telah menyelesaikan Diploma I atau lebih tinggi. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat menerima pembinaan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang cara mempromosikan UMKM. Usaha Mikro Binaan memperoleh omzet pada tingkat 11,68 persen, menurut data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

Kemahiran sumber daya manusia sangat penting dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Ada banyak aspek sumber daya manusia yang berkualitas rendah, seperti kompetensi, kemampuan, etos kerja, karakter, dan pemahaman tentang pentingnya standarisasi produk dan konsistensi kualitas. Kualitas sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh wawasan kewirausahaan yang merupakan komponen penting lainnya (Atmaja & Ratnawati, 2018). Menurut Supriyanto (Widjaja et al., 2018), salah satu elemen yang dapat memengaruhi kinerja organisasi atau bisnis adalah kompetensi.

Dalam proses pengembangan usaha, seorang wirausaha yang kompeten secara berkelanjutan berupaya untuk mengidentifikasi, memanfaatkan, dan menciptakan peluang usaha yang memiliki potensi untuk memberikan keuntungan finansial yang signifikan sambil meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Menurut Kasmir

(Niode, 2007) menyatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang memiliki nyali untuk memulai sebuah perusahaan pada beberapa kesempatan dengan mengambil risiko yang diperhitungkan.

Sumber daya penting bagi setiap pengusaha adalah keahlian kewirausahaan (Moeline & Syarif, 2022). Melalui pendidikan kewirausahaan, seseorang dapat belajar tentang kewirausahaan (Lai & Widjaja, 2023). Menurut Escobar-Castillo et al (2023), modal intelektual merupakan aset tidak berwujud yang sangat penting dalam mendorong kemampuan inovasi di UMKM untuk memecahkan masalah jangka pendek, artinya UMKM harus terus bersaing dalam situasi yang tidak pasti dengan sumber daya keuangan yang terbatas dan ketidakpastian strategis yang tentunya hal tersebut dapat dihadapi dengan daya tanggap sumber daya manusianya dari hasil intuisi, pengalaman, dan pembelajaran.

Pendidikan dalam kewirausahaan sangat penting karena mendorong pengembangan dan generasi pengetahuan yang berharga (Thomassen et al., 2020). Menurut Suryana (Lai & Widjaja, 2023), memahami proses kewirausahaan atau memiliki nyali untuk menangkap peluang dan mengambil risiko yang diperhitungkan adalah tujuan memiliki pengetahuan kewirausahaan. Pengetahuan ini yang akan menjadi wawasan untuk para wirausaha dalam mengembangkan UMKM. Saat ini, masih banyak usaha yang mengalami penurunan bahkan sampai gulung tikar karena pelaku usaha yang kurang paham dalam melakukan perencanaan bisnisnya.

Masalah pengelolaan keuangan juga masih menjadi isu utama dalam pengembangan UMKM. Laporan OECD/INFE mencatat bahwa UMKM memerlukan berbagai kompetensi bisnis umum dan spesifik, termasuk keterampilan manajemen keuangan, keterampilan yang memungkinkan mereka bernegosiasi dan beroperasi secara efektif dalam lingkungan bisnis, kemampuan untuk mengelola bisnis, serta keterampilan khusus yang dapat membantu mereka sukses dalam lingkungan yang kompetitif dan mudah berubah.

Pengelolaan keuangan yang efektif pada UMKM bertujuan untuk memastikan pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik dan teratur. Salah satu pendekatan untuk meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan adalah melalui literasi keuangan (Idawati & Pratama, 2020). Tindakan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keyakinan seseorang untuk membantu mereka mencapai kesejahteraan finansial yang lebih besar dan menangani uang mereka dengan lebih terampil dikenal sebagai literasi keuangan (Ardiansyah et al., 2022). Lebih lanjut, khususnya bagi pelaku usaha di Indonesia, literasi keuangan dianggap sebagai komponen penting dalam menentukan tingkat keberhasilan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat (Wikantari et al., 2022).

Berdasarkan data OJK, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia meningkat dari 38,03% pada tahun 2019 menjadi 49,68% pada tahun 2022, menurut hasil SNLIK (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan). Walaupun mengalami kenaikan tetapi masih dapat dikatakan rendah. Situasi ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah besar individu dalam masyarakat yang masih mengalami keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek keuangan. Dengan kemampuan memahami dan menangani masalah keuangan terkait, pelaku UMKM dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi mungkin lebih mudah untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan (Djuwita & Yusuf, 2018). Dengan memiliki literasi keuangan dapat meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan, perencanaan dana usaha, dan pengetahuan dasar keuangan sehingga nantinya berdampak pada pengembangan usaha dalam peningkatan produksi, laba usaha, hingga meningkatnya permodalan.

Teori mendasar yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Resource Based View* (RBV). Teori ini berfokus pada sumber daya dan kemampuan perusahaan menjadi dasar dari kemampuan daya saing. Sumber daya dan kapabilitas suatu perusahaan dapat ditempatkan dalam suatu kesatuan sehingga dapat bertahan lama dan tidak dapat ditiru (Elya Dasuki, 2021). Bisnis memprioritaskan informasi dan keterampilan daripada sumber daya statis untuk membuatnya tak tergantikan. Penelitian ini menggambarkan bagaimana UMKM

dapat memperoleh nilai tambah dan keunggulan kompetitif dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya intelektual berkualitas tinggi.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mauli Siagian et.al dalam *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol. 2 No. 2, Juni (2019) dengan judul “Analisis Faktor Eksternal dan Internal terhadap Kinerja UMKM di Kota Batam” diperoleh hasil bahwa faktor internal berpengaruh terhadap kinerja UMKM secara signifikan dan positif. Temuan studi ini mengklarifikasi bagaimana faktor internal, seperti keuangan dan sumber daya manusia mendukung pemilik UMKM dalam mencapai tujuan modal, laba, penjualan, dan ekspansi pasar mereka. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan Isnaeni Rokhayati dan Herwiek Diyah Lestari dalam *Journal And Proceeding Fakultas Ekonomi & Bisnis Unsoed* Vol. 6, No. 1 (2016) dengan judul “Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja UMKM Gula Kelapa (Studi Kasus UMKM Gula Kelapa di Kabupaten Banyumas)” menjelaskan bahwa para pemilik UMKM perlu memperhatikan masalah sumber daya manusia serta perlu meningkatkan aspek pengetahuan dan keterampilan akan keuangan, produksi, dan pemasaran untuk meningkatkan kinerja UMKM agar dapat berkembang dan mampu menghadapi persaingan.

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sony Hendra Permana dalam *Jurnal Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM di Indonesia* (2017) menjelaskan bahwa pendidikan kewirausahaan menjadi strategi dalam mengembangkan UMKM. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afirianus Giawa dalam *JURPEM: Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen* Vol. 2, (2022) dengan judul “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Motivasi Kewirausahaan terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah di Sektor Usaha Kue Lobak Umami Snack Pastry di Kecamatan Medan Kota” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pendidikan kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha.

Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Novia Nendita Tri Astuti dan Khusnul Hidayah dalam *Jurnal Seminar Nasional Akuntansi Bisnis dan Manajemen* Vol. 1, No.1 (2022) dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Efikasi Diri, dan Kompetensi Kewirausahaan terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil di Sleman” menjelaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keberhasilan UMKM. Sejalan juga pada penelitian Mei Ruli Ninin Hilmawati dan Rohmawati Kusumaningtias dalam *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* Vol. 10, No. 1 (2021) dengan judul “Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah” menjelaskan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM.

Dalam penelitian ini terdapat pembaruan dari variabel yang digunakan antara lain pendidikan kewirausahaan, literasi keuangan, dan pengembangan usaha dengan literasi keuangan sebagai variabel mediasi, serta lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Pancoran Mas. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Literasi Keuangan terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kota Depok Kecamatan Pancoran Mas”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Hingga saat ini terbukti bahwa usaha mikro mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mengatasi permasalahan pengangguran serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan mengingat peran signifikan yang dimainkan oleh usaha mikro dalam perekonomian Indonesia dan permasalahan yang dihadapi, maka peneliti perlu melakukan penelitian tentang pengembangan usaha mikro di Kota Depok khususnya Kecamatan Pancoran Mas. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh pendidikan kewirausahaan dan literasi keuangan terhadap pengembangan usaha mikro. Penelitian ini nantinya juga dapat memberikan gambaran dari strategi dan kebijakan dalam pengembangan usaha mikro di Kota Depok Kecamatan Pancoran Mas.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, terdapat beberapa pertanyaan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah pendidikan kewirausahaan memengaruhi pengembangan Usaha Mikro Kota Depok Kecamatan Pancoran Mas?
2. Apakah pendidikan kewirausahaan memengaruhi literasi keuangan?
3. Apakah literasi keuangan memengaruhi pengembangan Usaha Mikro Kota Depok Kecamatan Pancoran Mas?
4. Apakah literasi keuangan memediasi pengaruh tidak langsung pendidikan kewirausahaan terhadap pengembangan Usaha Mikro Kota Depok Kecamatan Pancoran Mas?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian, dan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh pendidikan kewirausahaan dan literasi keuangan terhadap pengembangan Usaha Mikro Kota Depok Kecamatan Pancoran Mas yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap pengembangan Usaha Mikro Kota Depok Kecamatan Pancoran Mas;
2. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap literasi keuangan;
3. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap pengembangan Usaha Mikro Kota Depok Kecamatan Pancoran Mas;
4. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung pendidikan kewirausahaan terhadap pengembangan Usaha Mikro Kota Depok Kecamatan Pancoran Mas dengan literasi keuangan sebagai mediator.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian di atas, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berpotensi berkontribusi secara teoritis sebagai bahan pengetahuan untuk penelitian di masa depan, khususnya studi tentang pengaruh pendidikan kewirausahaan dan literasi keuangan terhadap pengembangan usaha mikro.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh dengan kondisi kenyataan yang ada.
- b. Bagi pelaku usaha mikro, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan pemahaman akan pendidikan kewirausahaan dan literasi keuangan untuk pengembangan usahanya tersebut.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat untuk mengambil kebijakan dalam melakukan pengembangan usaha mikro dan mengatasi permasalahannya dengan pemberdayaan usaha.